

## RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Penerapan *Good Urban Governance* dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk dapat menyediakan RTH sebanyak 30 persen terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Penyediaan RTH menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Banyumas pada Kawasan Perkotaan Purwokerto. Namun, pemenuhan RTH masih dinilai kurang persentase RTH tahun 2022 sebesar 10,26 persen dan masih kurang 9,74 persen. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada tata kelola dalam merencanakan, mengelola, dan membiayai RTH. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian RDTRK Purwokerto yang tertuang dalam regulasi RDTRK Nomor 6 Tahun 2019-2039 terhadap regulasi pemerintah pusat yang mana luasan RTH lebih kecil dibandingkan dengan pedoman terbaru dan minimnya keterlibatan pemerintah dengan pihak lain sehingga kesulitan dalam menyediakan RTH.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait masalah tersebut, dilihat dari konsep *good urban governance* dalam pembangunan RTH di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Penelitian ini menggunakan model *Good Urban Governance* yang dikemukakan oleh UNHCS atau disebut UN-Habitat (2004) yang mengukur penerapan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu keberlanjutan, subsidiaritas, keterlibatan, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *theoretical sampling* pengambilan secara *purposive sampling* (*key informan*) dan *snowball sampling* untuk pemilihan informan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan divalidasi dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good urban governance* dalam pembangunan RTH yang diukur dari prinsip-prinsip belum dapat diterapkan dengan baik yaitu pada prinsip keberlanjutan, keterlibatan dan akuntabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan krusial yaitu ketidaksesuaian pedoman, tidak ada CSR yang terlibat, minimnya ketersediaan lahan, anggaran yang sedikit, serta *political will* Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah membuat Pemerintah Daerah masih kesulitan dan belum mampu menyediakan RTH Publik dengan baik untuk memenuhi 20 persen RTH Publik. Sementara itu, RTH Privat juga terjadi kegagalan yakni tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah kepada pihak *developer*, sehingga masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh *developer* terselubung dan perumahan. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah diharapkan bisa memperbaiki dan mengatasi permasalahan yaitu menyesuaikan pedoman dan menjalin kerjasama dengan *developer* untuk bersama-sama meningkatkan RTH Privat sebagai bentuk strategi guna menutupi kekurangan RTH Publik dalam mewujudkan pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Kata Kunci : *Good Urban Governance*, Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau

## SUMMARY

This research is entitled Application of Good Urban Governance in the Development of Green Open Space (GOS) in Purwokerto Urban Area. Based on the mandate given by the Government in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning to be able to provide 30 percent green space consisting of 20 percent of Public GOS and 10 percent of Private GOS. The provision of green space is an obligation of the local government of Banyumas Regency in Purwokerto Urban Area. However, the fulfillment of GOS is still considered lacking in the percentage of GOS in 2022 of 10.26 percent and is still 9.74 percent less. This is due to problems in governance in planning, managing, and financing GOS. The problem is related to the incompatibility of the Purwokerto RDTRK contained in the RDTRK Number 6 of 2019-2039 regulation against central government regulations where the GOS area is smaller than the latest guidelines and the lack of government involvement with other parties making it difficult to provide GOS.

The purpose of this research is to analyze in more depth the application of good urban governance in the development of GOS in Purwokerto Urban Area. This research uses the Good Urban Governance model proposed by UNHCS or called UN-Habitat which describes the application seen from the principles of sustainability, subsidiarity, civil engagement, accountability and transparency, efficiency, security and equity. This research uses descriptive qualitative research methods using theoretical sampling techniques using purposive sampling (key informants) and snowball sampling for the selection of informants. Data collection methods using interviews, observation and documentation were analyzed using an interactive analysis model and validated by source triangulation.

The results showed that the application of good urban governance in the development of GOS as measured by the principles could not be applied properly, namely in the principles of sustainability, involvement and accountability. This is indicated by the existence of crucial problems, namely the incompatibility of guidelines, no CSR involved, the lack of land availability, a small budget, as well as the political will of the Regional head and the Regional Government, making the Regional Government still difficult and unable to provide Public GOS properly to fulfill 20 percent GOS. Meanwhile, Private GOS also failed, namely the absence of strict supervision from the local government to the developer, so that there are still violations committed by covert and residential developers. From the results of the study, the government is expected to improve and overcome the problem, namely adjusting guidelines and establishing cooperation with developers to jointly increase Private GOS as a form of strategy to cover the lack of Public GOS in realizing the fulfillment of GOS in Purwokerto Urban Area.

Keywords: Good Urban Governance, Urban Area, Green Open Space (GOS)